

## Ringkasan Kebijakan

# Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

### PESAN UTAMA

- Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk sektor pertanian.
- Stabilitas harga kebutuhan pangan pokok tidak terlepas dari pasokan yang memadai. Ketersediaan bahan pangan pokok dalam kondisi pandemi memegang peranan penting. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan di tengah pandemi.
- Stimulus untuk sektor pertanian menjadi kebutuhan guna menjaga daya tahan sosial ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi.
- Pemerintah dapat melakukan intervensi pada input produksi pertanian yang memiliki kontribusi relatif besar, yaitu pupuk, benih unggul, dan pestisida. Intervensi lain yang mungkin dilakukan adalah memberikan program pinjaman tanpa agunan untuk petani dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Pemerintah perlu memastikan program stimulus sektor pertanian dapat berjalan dan memberlakukan sistem kontrak bagi petani untuk memastikan budi daya prioritas dapat berjalan pada musim tanam berikutnya, dengan kesanggupan untuk membeli hasil-hasil pertanian yang dibudidayakan pada musim panen berikutnya.

### LATAR BELAKANG

Covid-19 mengganggu sistem pangan Indonesia. Ketenagakerjaan di bidang pertanian diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 4,87 persen, sedangkan produksi pertanian domestik akan menyusut sebesar 6,2 persen. Impor akan turun sebesar 17,11 persen dan harganya diperkirakan akan naik sebesar 1,20 persen dalam jangka pendek dan sebesar 2,42 persen pada 2022. Dengan berkurangnya pasokan dalam negeri dan dari impor, kekurangan pangan dan inflasi harga makanan berpotensi besar terjadi.

Saat krisis 2008, ketahanan pangan menjadi perhatian utama pemerintah. Masalah ini juga akan menjadi isu penting dalam krisis kali ini, baik dalam skala nasional maupun di beberapa daerah yang rentan. Sebagian besar daerah dengan tingkat kekurangan gizi yang tinggi saat ini diyakini disebabkan oleh kekurangan pangan pada krisis lalu. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga

musim tanam tahun ini dan memastikan produksi beras dalam negeri memadai. Di tingkat petani, untuk melakukan hal tersebut, mereka perlu mendapatkan input.

Data terkini menunjukkan sektor pertanian telah mengalami kontraksi. Pada Februari 2020, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian menurun sebesar 60 ribu orang atau sekitar 0,42 persen dibandingkan dengan tahun lalu (BPS, 2020). Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya mampu tumbuh 0,02 persen secara tahunan. Meskipun demikian, sektor pertanian masih cukup potensial untuk menjadi tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara kuartalan, pertanian masih sanggup tumbuh 9,46 persen (BPS, 2020).

Di wilayah Indonesia yang miskin dan terpencil, kerawanan pangan telah terjadi bahkan sebelum virus corona melanda. Kini, dengan hilangnya sumber uang dari remitansi dan mata pencarian di luar pertanian, kerawanan akan terjadi

dalam skala lebih besar, kecuali pendapatan yang hilang dari pertanian dapat tergantikan. Transfer tunai rumah tangga tidak akan cukup untuk menutup investasi besar di muka yang diperlukan untuk mendapatkan input pertanian.

Sampai saat ini, kebijakan ketahanan pangan pemerintah adalah berfokus menjaga pasokan bahan makanan pokok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya mengenai berbagai langkah untuk meningkatkan produksi dalam negeri, tetapi juga tindakan yang bersifat sementara untuk menghapus tarif dan mengurangi persyaratan lisensi impor nonotomatis (surat persetujuan impor) untuk bahan makanan penting seperti daging sapi dan gula. Misalnya, jika tarif dihapuskan, harga impor barang pertanian masih mungkin akan naik tetapi hanya sebesar 0,65 persen. Upaya lain termasuk bantuan untuk peternak ayam, peningkatan kredit pertanian, dan insentif harga untuk sereal.

Namun, pilar utama strategi ketahanan pangan berada di tangan petani sendiri. Krisis tidak hanya akan memengaruhi konsumsi rumah tangga mereka, tetapi juga kemampuan mereka untuk menanam dan memanen tanaman. Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada produksi makanan pokok dalam negeri, termasuk beras, jagung, dan singkong. Dengan adanya larangan ekspor beras di Vietnam dan India, pemerintah Indonesia harus memastikan petani skala kecil tidak melewatkan musim tanam tahun ini. Hal ini sangat penting mengingat banyak petani yang mungkin menghadapi kesulitan mendapatkan input untuk menanam, baik karena kekurangan atau kehilangan remitansi dari anggota keluarga maupun hilangnya upah dari pekerjaan di luar musim tanam.

Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi memegang peranan penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pandemi Covid-19 berpengaruh pada krisis pangan jika tidak dikelola dengan baik. Di satu sisi, pandemi Covid-19 mendorong penerapan pembatasan sosial. Di sisi lain, kebutuhan pangan diperkirakan dikonsumsi dalam kuantitas yang sama meskipun aktivitas masyarakat lebih terbatas.

Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi memegang peranan penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pandemi Covid-19 berpengaruh pada krisis pangan jika tidak dikelola dengan baik. Di satu sisi, pandemi Covid-19 mendorong penerapan pembatasan sosial. Di sisi lain, kebutuhan pangan diperkirakan dikonsumsi dalam kuantitas yang sama meskipun aktivitas masyarakat lebih terbatas.

**Tabel 1.** Konsumsi Makanan Pokok per Pekan

Pangan Pokok	Jumlah	Unit
Beras	408,6	Ribu Ton
Daging Sapi	2,4	Ribu Ton
Daging Ayam	31,8	Ribu Ton
Telur	579	Juta Butir
Cabai	20,2	Ribu Ton
Bawang Merah	139,8	Juta Ons
Kedelai	245	Ton
Jagung	12,8	Ribu Ton

Sumber: Kementerian Keuangan, Bahan Rapat Kabinet Terbatas, Jakarta, 9 April 2020

Stabilitas harga kebutuhan pangan pokok tidak terlepas dari ketersediaan pasokan yang memadai. Pada akhir April 2020, kondisi stok pangan pokok diperkirakan defisit di beberapa wilayah. Beras mengalami defisit di tujuh provinsi, yakni di Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Untuk jagung, kekurangan ketersediaan diperkirakan terjadi di 11 provinsi, yakni di Sumatera (3 provinsi), Jawa (3), Kalimantan (2), Papua (2), dan Bali. Komoditas pangan lain yang mengalami defisit adalah cabai besar (23 provinsi), cabai rawit (19), telur ayam (22), daging ayam (14), daging sapi (5), bawang putih (31), gula pasir (30), serta bawang merah (1). Hanya minyak goreng yang pasokannya surplus di semua provinsi.

## KONDISI PERTANIAN PANGAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, termasuk pada pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, produksi dalam negeri memegang peranan kunci meskipun terdapat opsi untuk melakukan impor. Namun dalam kondisi pandemi, impor pun bisa terkendala karena sejumlah negara menahan ekspor pangan demi memenuhi kebutuhan domestiknya.

**Gambar 2.** Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor, 2018



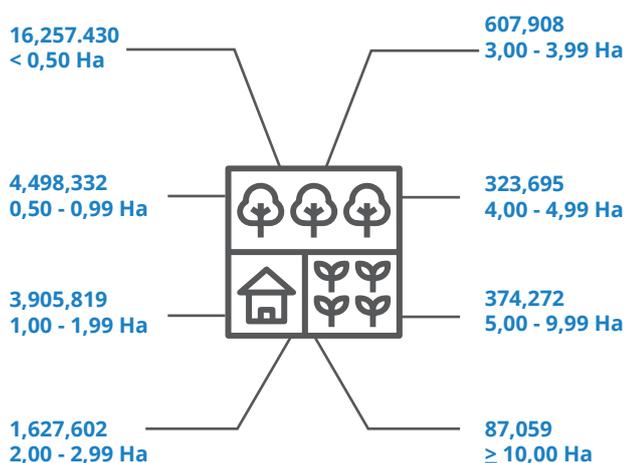
Sumber: BPS, Hasil Survei Pertanian Antar-Sensus 2018

Indonesia sebenarnya memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Hasil Survei Pertanian Antar-Sensus (SUTAS) 2018 menunjukkan terdapat 27.682.117 rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen dibandingkan pada 2013 sesuai Sensus Pertanian (ST) 2013. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47,5 persen RTUP merupakan produsen padi dan 25,8 persen adalah produsen palawija.

Masalah utama yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan sektor pertanian adalah relatif rendahnya tingkat produktivitas di beberapa daerah. Wilayah-wilayah yang mengalami defisit pasokan beras merupakan daerah dengan tingkat produksi padi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Diperlukan intervensi secara serius di daerah-daerah ini untuk meningkatkan produksi padi guna memenuhi kebutuhan pangan di wilayah tersebut.

Masalah lain di sektor tanaman pangan adalah petani skala mikro lebih mendominasi kelompok RTUP. Hasil SUT 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 58,7 persen petani merupakan petani dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 hektare. Intervensi dalam jangka pendek yang perlu dilakukan pada kelompok ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan yang dikelola sesuai dengan komoditas yang relevan dengan kelompok tersebut.

**Gambar 3.** Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Luas Penguasaan Lahan, 2018

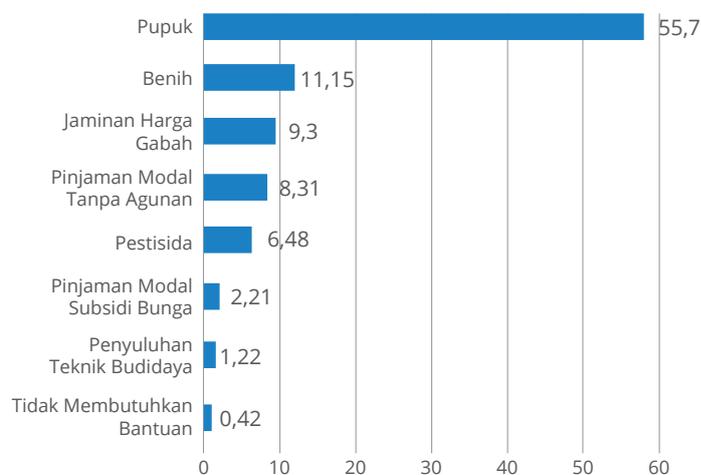


Sumber: BPS, Hasil Survei Pertanian Antar-Sensus 2018

Secara umum, sektor pertanian padi, jagung, dan kedelai masih cukup menjanjikan sebagai sektor yang menguntungkan untuk diusahakan. Hasil Survei Struktur Ongkos Padi/Palawija (SOUT) 2017 yang dilakukan di 34 provinsi menunjukkan rasio pendapatan bersih pada padi sawah sebesar 26,7 persen, padi ladang (21,3 persen), jagung (29,1 persen), dan kedelai (11,9 persen). Tenaga kerja dan jasa pertanian cukup dominan dalam komponen ongkos produksi masing-masing produk pertanian tadi, yakni sebesar 48,8 persen, 60 persen, 48,6 persen, dan 47,2 persen.

Hasil SOUT 2017 yang terkait dengan persepsi petani menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang dibutuhkan oleh petani untuk mempertahankan usaha pertanian sebagian besar adalah kebutuhan pupuk, yakni sebesar 55,7 persen. Kondisi ini sejalan dengan tingkat ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk, dengan hanya 3 persen petani yang tidak menggunakan pupuk. Harapan lain terhadap pemerintah adalah adanya benih unggul, jaminan harga gabah, pinjaman tanpa agunan, dan pestisida.

**Gambar 4.** Persentase Rumah Tangga Padi Menurut Jenis Bantuan yang Paling Diharapkan dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah



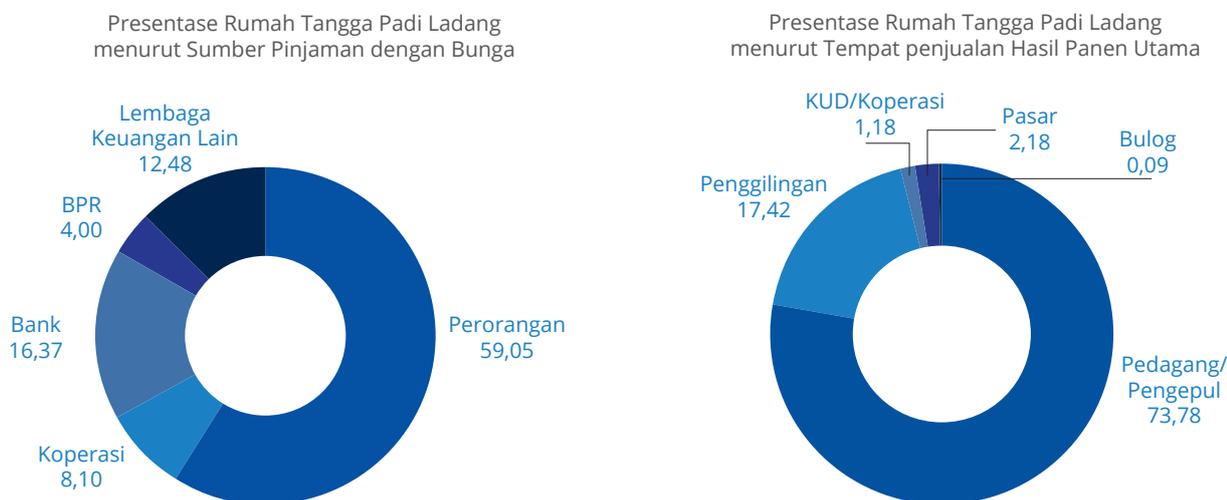
Sumber: BPS, Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017

Untuk menjaga ketahanan pangan domestik pada masa pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberikan stimulus bagi sektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan utama. Dari hasil SOUT 2017, terdapat komponen produksi sektor pertanian pangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan instrumen intervensi melalui stimulus fiskal sektor pertanian. Pemerintah dapat memberikan stimulus dalam pengadaan benih, pupuk, dan pestisida untuk meningkatkan produksi dalam jangka pendek.

Sebagai gambaran, komponen pupuk memiliki kontribusi sekitar 4-9 persen pada total biaya produksi, sedangkan benih sekitar 3-8 persen dari total biaya produksi (BPS, 2018). Adapun pestisida menyumbang sekitar 3-4 persen dari biaya produksi. Langkah intervensi ini memungkinkan

untuk dilakukan dalam jangka pendek guna meningkatkan ketersediaan pangan domestik daripada melakukan pengadaan lahan pertanian sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya.

**Gambar 5** Profil Rumah Tangga Pertanian terhadap Akses Pasar dan Permodalan



Sumber: Hasil Survei Struktur ongkos Usaha Tanaman Padi 2017

Hasil SOUT2017-SPD menunjukkan bahwa rumah tangga padi ladang masih kesulitan dalam mengakses pinjaman ke bank (BPS, 2018). Hasil survei memperlihatkan hanya sebesar 16,37 persen rumah tangga padi ladang yang sebagian besar atau seluruh sumber pinjaman dengan bunganya berasal dari bank. Sebagian besar rumah tangga (59,05 persen) memperoleh pinjaman dengan bunga dari perorangan untuk membiayai kegiatan usaha taninya. Alasan utama sebagian besar rumah tangga itu

tidak meminjam ke bank adalah mereka tidak mempunyai agunan dan prosedur pinjamannya berbelit-belit. Persentase rumah tangga yang mengalami kendala karena dua hal tersebut masing-masing mencapai 26,77 persen dan 31,48 persen. Sebagian besar rumah tangga menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul (73,78 persen) dan penggilingan padi (17,42 persen). Keberadaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijadikan sebagai alternatif solusi atas permasalahan ini.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL

- Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan di tengah pandemi yang sedang dihadapi. Stimulus untuk sektor pertanian menjadi kebutuhan untuk menjaga daya tahan sosial ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi.
- Pemerintah dapat memberikan intervensi pada input produksi pertanian yang memiliki kontribusi relatif besar, yakni pupuk, benih unggul, dan pestisida. Intervensi lain yang mungkin dilakukan adalah memberikan program pinjaman tanpa agunan kepada petani.
- Pemerintah perlu untuk menginstruksikan instansi terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan intervensi yang diperlukan sesuai dengan komoditas unggulan di setiap daerah, dengan melibatkan sumber daya manusia yang ada di lapangan, seperti penyuluh pertanian dan pendamping desa.
- Pemerintah perlu memastikan program stimulus sektor pertanian dapat berjalan dan memberlakukan sistem kontrak kepada petani untuk memastikan budi daya prioritas dapat berjalan pada musim tanam berikutnya, dengan kesanggupan pemerintah untuk membeli hasil-hasil pertanian yang dibudidayakan pada musim panen berikutnya.

## REFERENSI

- BPS. (2018). Hasil Survei Struktur ongkos Usaha Tanaman Padi 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020, No. 40/05/Th. XXIII, 05 Mei 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020, No. 39/05/Th. XXIII, 5 Mei 2020. Jakarta: Badan Pusat

## LAMPIRAN

**Tabel 1.** Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Musim Tanam per Hektare Budi Daya Tanaman Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, dan Kedelai, 2017

Uraian	Padi Sawah		Padi Ladang		Jagung		Kedelai	
	Nilai (000 Rupiah)	%						
<b>A. Produksi</b>	<b>18.514,84</b>	<b>100,00</b>	<b>10.739,79</b>	<b>100,00</b>	<b>14.385,53</b>	<b>100,00</b>	<b>10.274,31</b>	<b>100,00</b>
1. Utama	18.437,65	99,58	10.600,49	98,70	14.259,29	99,12	10.123,90	98,54
2. Ikutan	77,19	0,42	139,30	1,30	126,24	0,88	150,41	1,46
<b>B. Ongkos Produksi</b>	<b>13.559,30</b>	<b>100,00</b>	<b>8.455,71</b>	<b>100,00</b>	<b>10.197,14</b>	<b>100,00</b>	<b>9.045,85</b>	<b>100,00</b>
1. Bibit/benih	514,36	3,79	401,96	4,75	899,12	8,82	591,02	6,53
2. Pupuk	1.278,00	9,43	710,59	8,40	1.370,09	13,44	449,18	4,97
3. Pesticida	569,55	4,20	296,59	3,51	352,02	3,45	363,57	4,02
4. Tenaga kerja dan jasa pertanian	6.615,19	48,79	5.074,31	60,01	4.951,13	48,55	4.272,07	47,23
a. Tenaga kerja dibayar	2.282,09	16,83	1.701,36	20,12	1.663,09	16,31	1.456,44	16,10
b. Tenaga kerja tidak dibayar	1.946,97	14,36	2.776,71	32,84	2.497,37	24,49	2.274,25	25,14
c. Jasa Pertanian	2.386,13	17,60	596,24	7,05	790,67	7,75	541,38	5,99
5. Sewa lahan/perkiraan sewa lahan	3.472,36	25,61	1.204,78	14,25	1.792,48	17,58	2.613,33	28,89
6. PBB/perkiraan PBB	80,10	0,59	48,37	0,57	58,28	0,57	76,25	0,84
7. Bunga pinjaman/perkiraan bunga pinjaman	35,48	0,26	16,90	0,20	44,47	0,44	10,90	0,12
8. Retribusi/pungutan/iuran	78,30	0,58	23,46	0,28	42,19	0,41	52,85	0,58
9. Premi asuransi	1,77	0,01	3,58	0,04	1,30	0,01	1,36	0,02
10. Sewa/perkiraan sewa alat	398,81	2,94	236,57	2,80	230,03	2,26	208,44	2,30
11. Penyusutan	211,39	1,56	163,91	1,94	155,42	1,52	179,17	1,98
12. Bahan bakar	127,90	0,94	107,96	1,28	132,57	1,30	113,46	1,26
i. Bahan bakar minyak (BBM)	123,43	0,91	104,66	1,24	128,42	1,26	106,37	1,18
ii. Bahan bakar gas (BBG)/elpiji	4,47	0,03	3,30	0,04	4,15	0,04	7,09	0,08
13. Lainnya	176,09	1,30	166,73	1,97	168,04	1,65	114,25	1,26
<b>C. Pendapatan</b>	<b>4.955,54</b>	<b>0,37</b>	<b>2.284,08</b>	<b>0,27</b>	<b>4.188,39</b>	<b>0,41</b>	<b>1.228,46</b>	<b>0,14</b>
<b>D. Rasio Pendapatan terhadap biaya (C/B)</b>	<b>0,37</b>		<b>0,27</b>		<b>0,41</b>		<b>0,14</b>	

Sumber: BPS, 2017

**Tabel 2.** Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi, 2018-2019

PROVINSI	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi					
	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ku/Ha)		Produksi (Ton)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ACEH	329.515,8	310.012,5	56,5	55,3	1.861.567,1	1.714.437,6
SUMATERA UTARA	408.176,5	413.141,2	51,7	50,3	2.108.284,7	2.078.901,6
SUMATERA BARAT	313.050,8	311.671,2	47,4	47,6	1.483.076,5	1.482.996,0
RIAU	71.448,1	63.142,0	37,3	36,6	266.375,5	230.874,0
JAMBI	86.202,7	69.536,1	44,4	44,6	383.045,7	309.932,7
SUMATERA SELATAN	581.574,6	539.316,5	51,5	48,3	2.994.191,8	2.603.396,2
BENGKULU	65.891,2	64.406,9	43,8	46,0	288.810,5	296.472,1
LAMPUNG	511.940,9	464.103,4	48,6	46,6	2.488.641,9	2.164.089,3
KEP. BANGKA BELITUNG	17.233,6	17.087,8	26,5	28,6	45.724,7	48.805,7
KEP. RIAU	375,9	356,3	29,2	32,3	1.097,0	1.150,8
DKI JAKARTA	673,4	622,6	72,8	54,0	4.899,1	3.359,3
JAWA BARAT	1.707.253,8	1.578.835,7	56,5	57,5	9.647.358,8	9.084.957,2
JAWA TENGAH	1.821.983,2	1.678.479,2	57,6	57,5	10.499.588,2	9.655.654,0
DI YOGYAKARTA	93.956,5	111.477,4	54,8	47,9	514.935,5	533.477,4
JAWA TIMUR	1.751.191,7	1.702.426,4	58,3	56,3	10.203.213,2	9.580.933,9
BANTEN	344.836,1	303.731,8	48,9	48,4	1.687.783,3	1.470.503,4
BALI	110.978,4	95.319,3	60,1	60,8	667.069,1	579.320,5
NUSA TENGGARA BARAT	289.242,6	281.666,0	50,5	49,8	1.460.338,8	1.402.182,4
NUSA TENGGARA TIMUR	218.232,9	198.867,4	41,2	40,8	899.935,9	811.724,2
KALIMANTAN BARAT	286.476,0	290.048,4	27,9	29,2	799.715,2	847.875,1
KALIMANTAN TENGAH	147.571,7	146.144,5	34,9	30,4	514.769,1	443.561,3
KALIMANTAN SELATAN	323.091,2	356.246,0	41,1	37,7	1.327.492,4	1.342.861,8
KALIMANTAN TIMUR	64.961,2	69.707,8	40,5	36,4	262.773,9	253.818,4
KALIMANTAN UTARA	13.707,0	10.294,7	32,9	32,4	45.063,5	33.357,2
SULAWESI UTARA	70.352,6	62.020,4	46,5	44,8	326.929,7	277.776,3
SULAWESI TENGAH	201.279,2	186.100,4	46,1	45,4	926.978,7	844.904,3
SULAWESI SELATAN	1.185.484,1	1.010.188,8	50,2	50,0	5.952.616,5	5.054.167,0
SULAWESI TENGGARA	136.673,8	132.343,9	39,4	39,3	538.876,1	519.706,9
GORONTALO	56.631,6	49.010,0	47,6	47,2	269.540,4	231.211,1
SULAWESI BARAT	65.303,8	62.581,5	48,5	48,0	316.478,4	300.142,2
MALUKU	29.052,1	25.976,9	40,0	37,8	116.228,9	98.254,8
MALUKU UTARA	13.412,8	11.700,5	36,6	32,4	49.047,1	37.945,6
PAPUA BARAT	7.767,0	7.192,2	32,2	41,6	24.967,1	29.943,6
PAPUA	52.412,0	54.131,7	42,6	43,5	223.119,4	235.339,5
<b>INDONESIA</b>	<b>11.377.934,4</b>	<b>10.677.887,2</b>	<b>52,0</b>	<b>51,1</b>	<b>59.200.533,7</b>	<b>54.604.033,3</b>

Sumber: BPS, 2020

**Tabel 3.** Ketersediaan Komoditas Pangan, April 2020

No	Provinsi	Surplus/defisit (Ton)						
		Beras	Jagung	Cabe Besar	Cabe Rawit	Bawang Merah	Bawang Putih	Gula Pasir
1	ACEH	93.606	26.724	1.022	554	25.596	(434)	(4.713)
2	SUMATERA UTARA	47.285	2.681	6.974	(2.179)	21.734	(2.091)	17.874
3	SUMATERA BARAT	148.071	17.387	4.779	(326)	31.008	1.477	(4.851)
4	RIAU	(28.659)	(486)	(1.063)	(1.432)	28.782	(1.151)	(6.080)
5	JAMBI	14.999	1.082	1.670	99	31.514	(482)	(3.153)
6	SUMATERA SELATAN	283.735	23.191	423	(1.430)	34.876	(1.625)	14.302
7	BENGKULU	51.292	4.866	4.953	415	26.022	(264)	(1.744)
8	LAMPUNG	301.493	186.019	916	(1.271)	30.848	(1.911)	143.751
9	KEP.BANGKA BELITUNG	(14.979)	(1.107)	(175)	(218)	37.142	(241)	(1.286)
10	KEPULAUAN RIAU	(21.658)	(1.544)	(518)	(577)	37.202	(441)	(2.020)
11	DKI JAKARTA	12.695	(8.016)	(3.633)	(3.373)	44.267	(1.850)	(9.251)
12	JAWA BARAT	1.100.608	(934)	(1.616)	(7.831)	41.542	(5.088)	(43.354)
13	JAWA TENGAH	872.953	19.456	11.931	2.806	20.389	14.741	(30.385)
14	DI YOGYAKARTA	60.403	1.945	(564)	(646)	23.647	(916)	(3.428)
15	JAWA TIMUR	1.533.697	103.137	148	42.903	(18.861)	(7.400)	(34.949)
16	BANTEN	529.020	(126.751)	(3.762)	(3.771)	34.994	(1.990)	(11.279)
17	BALI	28.809	(6.370)	(810)	1.377	26.211	(369)	(3.861)
18	NUSA TENGGARA BARAT	250.807	596.954	348	1.551	32.364	(67)	(4.571)
19	NUSA TENGGARA TIMUR	68.404	258.743	(1.347)	(878)	47.140	(486)	(4.823)
20	KALIMANTAN BARAT	85.087	2.265	(1.394)	(578)	56.012	(763)	(4.465)
21	KALIMANTAN TENGAH	20.899	1.685	(661)	(98)	40.595	(548)	(2.350)
22	KALIMANTAN SELATAN	89.999	16.286	(424)	(78)	32.655	(666)	(3.734)
23	KALIMANTAN TIMUR	19.653	(1.833)	(730)	(363)	43.726	(820)	(3.205)
24	KALIMANTAN UTARA	(2.754)	(27)	(109)	8	77.477	(119)	(620)
25	SULAWESI UTARA	23.287	21.517	(268)	1.265	37.289	3.982	(2.198)
26	SULAWESI TENGAH	57.568	36.564	(126)	766	42.558	(385)	(2.696)
27	SULAWESI SELATAN	673.567	130.472	(1.280)	(655)	28.945	(725)	(7.775)
28	SULAWESI TENGGARA	26.298	30.976	(445)	10	43.987	(258)	(2.365)
29	GORONTALO	12.316	107.644	(368)	725	54.167	(133)	19.843
30	SULAWESI BARAT	18.262	29.866	(164)	(71)	24.265	(174)	(1.205)
31	MALUKU	(3.275)	2.851	(187)	32	59.851	(321)	(1.563)
32	MALUKU UTARA	(10.972)	259	153	165	69.758	(168)	(1.095)
33	PAPUA BARAT	(9.253)	(602)	(167)	20	49.321	(219)	(862)
34	PAPUA	20.853	(707)	(865)	(568)	90.439	(710)	(2.968)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.354.115</b>	<b>1.474.192</b>	<b>12.641</b>	<b>26.353</b>	<b>1.307.462</b>	<b>(12.614)</b>	<b>(11.079)</b>

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020

---

Ringkasan kebijakan **Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19** ditulis oleh Priadi Asmanto, Ardi Adji, Anggota Unit Riset TNP2K, dan Sutikno, Sekretariat TNP2K. Mei 2020, Jakarta, Indonesia.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Australia. Pembaca dipersilakan untuk menyalin, menyebarluaskan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan nonkomersial.

---

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
Grand Kebon Sirih Lt.4, Jl.Kebon Sirih Raya No.35  
Jakarta Pusat, 10110  
T. 021 - 3912812

[www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)